



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
UNIT KERJA : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

- Nama : AINUDDIN
- Jabatan : KEPALA BIDANG
- NHK : 415062

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 650.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/72 m2 di LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/60 m2 di PASURUAN, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 160.000.000

- MOTOR, YAMAHA MIO BEBEK Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
- MOTOR, YAMAHA BEBEK/B5D A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
- MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 55.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 19.711.172

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 884.711.172

III. HUTANG Rp. 159.264.816

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 725.446.356

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
UNIT KERJA : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DELTA DATUTASIK
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 887921

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	630.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 175 m2/88 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 510.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 50 m2/100 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, LAINNYA Rp. 120.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	356.300.000
1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA 2.0 G M/T / MINIBUS Tahun 2018, HIBAH TANPA AKTA Rp. 200.000.000		
2. MOBIL, HONDA BRIO SATYA 1.2 E CVT CKD/MINIBUS Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000		
3. LAINNYA, POLYGON URBANO 5 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000		
4. LAINNYA, WIM CYCLE SEPEDA ANAK Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 900.000		
5. LAINNYA, WIM CYCLE SEPEDA ANAK Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 900.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	158.610.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	204.158.316
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.349.068.316



III. HUTANG

Rp. 325.560.199

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.023.508.117

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memenuhi kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.





PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
UNIT KERJA : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

- Nama** : M. MUJAHID SHALEH
- Jabatan** : KEPALA BIDANG
- NHK** : 936461

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	400.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/181 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	128.000.000
1. MOTOR, YAMAHA XEON-RC (1LB)/SOLO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000		
2. MOBIL, TOYOTA NEW AVANZA 1.3G M/T/MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	108.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	28.502.595
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	664.502.595
III. HUTANG	Rp.	196.730.873
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	467.771.722

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Februari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
UNIT KERJA : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MUNADIAH AS'AD**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **462763**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **745.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 220 m2/70 m2 di LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/64 m2 di SIDENRENG RAPPANG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. Tanah Seluas 220 m2 di LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
4. Tanah Seluas 330 m2 di LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
5. Tanah Seluas 5000 m2 di LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
6. Tanah Seluas 5648 m2 di SIDENRENG RAPPANG, WARISAN Rp. 100.000.000
7. Tanah Seluas 2781 m2 di SIDENRENG RAPPANG, WARISAN Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **79.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA 1300 G/MINI BUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
2. MOTOR, SUZUKI BLSOLO 125 SCD SHOGUN Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **50.500.000**

D. SURAT BERHARGA Rp. **---**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **111.103.381**

F. HARTA LAINNYA Rp. **---**



Sub Total	Rp.	985.603.381
III. HUTANG	Rp.	104.734.768
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	880.868.613

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.